

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Oleh :
Zulfikar ¹⁾
Matius Bangun ²⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2)}
E-mail:
mbresearch28@gmail.com ¹⁾

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 3 (tiga) kebutuhan pokok yang sering juga disebut kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Upaya upaya yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan rumah yang layak huni bagi rakyatnya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal karena masih kurangnya Sosialisasi sehingga berdampak kurangnya pemahaman akan procedure /persyaratan baik administrasi maupun teknis. Faktor Pendorong dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari Kekuatan (Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dan Peluang (Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan). Sedangkan Faktor Penghambat adalah Adanya Kelemahan (Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS; Penyaluran bahan dan material, Minimnya pengetahuan penerima tentang pertanggungjawaban) serta Ancaman atau Hambatan (Cuaca hujan tinggi saat konstruksi, Perubahan kebijakan tentang BSPS, Kesenambungan program BSPS). Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif yaitu Strategi Menggunakan KEKUATAN dengan memanfaatkan PELUANG. Menggunakan Kekuatan yaitu : Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dengan Memanfaatkan Peluang yaitu : Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga lebih mudah di pahami calon penerima. Demikian juga perlu penyesuaian kondisi masyarakat local dengan persyaratan teknis agar persyaratan status tanah calon penerima BSPS jika belum memiliki surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku cukup dengan Surat Keterangan untuk selanjutnya pemerintah memfasilitasi untuk menda[atkan surat tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Perumahan Rakyat

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki 3 (tiga) kebutuhan pokok yang sering juga disebut kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Papan dalam hal ini adalah rumah yang layak huni bagi masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak sehingga rumah tersebut menjadi layak huni.

Upaya upaya yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan rumah yang

layak huni bagi rakyatnya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni itu sendiri bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa hak dasar rakyat tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi yang salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya masyarakat berpenghasilan rendah antara lain adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan yang dimiliki sehingga adanya kesenjangan dalam kemampuan masyarakat terhadap daya beli, terkhusus masyarakat miskin, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar salah satunya adalah rumah layak huni.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan pembangunan nasional memiliki visi mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Rumah Swadaya memiliki tugas melaksanakan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Dalam mendorong keswadayaan masyarakat untuk

mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.

Direktorat Rumah Swadaya tersebut memiliki tugas memberi bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah. Jenis rumah yang dibangun adalah Rumah Swadaya. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Hal ini sesuai dengan cita cita bangsa bahwa pembangunan tidak hanya di lakukan oleh pemerintah tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di sektor publik yaitu fasilitas yang di gunakan secara bersama sama oleh masyarakat tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat miskin. Kebutuhan utama masyarakat selain sandang dan pangan adalah papan yang dalam bahasa sehari hari rumah yang layak huni.

Perumahan layak huni adalah salah satu contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah bersama rakyat dalam bentuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga masyarakat bisa merasakan Rumah Layak Huni dan lingkungan hidup yang sehat. Program BSPS ini berjalan sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2015 dan di harapkan tetap berjalan sampai beberapa tahun ke depan sesuai dengan permasalahan yang di hadapi.

Program ini adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan selama ini tentu terdapat positif atau negative tergantung wilayah/daerah masing-masing sesuai dengan kondisinya. Tidak terkecuali di Kota Langsa Provinsi Aceh memerlukan evaluasi dalam pelaksanaannya yang sering di sebut

Evaluasi Implementasi. Berbagai fenomena lapangan tentang efektif dan efisiennya program, tujuan program, pertanggungjawaban program perlu di evaluasi sehingga dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan ini di masa-masa yang akan datang khususnya di Kota Langsa Provinsi Aceh.

Hasil pengamatan lapangan di Kota Langsa menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah serta belum memiliki rumah yang layak huni yang sehat, aman dan nyaman. Dengan adanya permasalahan tersebut terbentuklah suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut merupakan respon atas adanya permasalahan yang terjadi tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada tahun 2014 telah berganti nama menjadi Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program BSPS ini khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Di Kota Langsa program ini sudah berjalan lebih dari 5 (lima)

tahun sehingga perlu adanya suatu evaluasi baik dievaluasi dari segi Tujuan, Akuntabilitas serta Masukan yang di berikan untuk kebijakan yang lebih baik di masa datang. Tujuan evaluasi apakah implemntasi program sudah sessuai dengan rencana awal. Akuntabilitass adalah pertanggungjawab pejabat public sebagai pelaksana kegiatan baik secara anggaran, ekonomi, politik, keuangan dan evaluasi Masukan adalah masukan yang di berikan dari hasil evaluassi terhadap kebijakan yang akan datang sebagai sebuah rekomendasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan mencoba menganalisis tentang evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.1 Evaluasi

Salah satu tahapan dari siklus kebijakan publik adalah evaluasi setelah suatu kebijakan di implementasikan. Dalam evaluasi analisis yang di gunakan sangat berhubungan dengan tujuan dari suatu suatu evaluasi, aluntabilitas suatu kebijakan serta masukan yang akan di berikan oleh hasil evaluasi terhadap kebijakan yang akan datang. Teguh Yuwown *dalam* Foima Sihombing (2019) mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan suatu Evaluasi setidaknya tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya,

- b. menunjukkan bentuk akuntabilitas kepada publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, dan
- c. untuk memberikan masukan (saran-saran/rekomendasi) pada kebijakan-kebijakan publik yang akan di ambil dimasa yang datang.

2.1.1 Tujuan Evaluasi

Sementara itu hampir sama dengan Teguh Yuwono *dalam* Foima Sihombing (2019) menyatakan setidaknya terdapat enam hal tujuan evaluasi yaitu untuk : a) Memberikan masukan bagi perencanaan program; b) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut kegiatan dan program; c) Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program; d) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program; e) Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

2.1.2 Akuntabilitas Kebijakan

Setelah adanya Tujuan maka suatu kebijakan tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan. Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* yang diartikan sebagai sesuatu untuk dapat dipertanggungjawabkan atau dalam kata sifat disebut sebagai akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju kondisi pemerintahan yang *clean government* (pemerintahan yang bersih).

Konsep akuntabilitas bukanlah merupakan hal yang baru karena hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998.

2.1.3 Masukan Kebijakan

Masukan yang diberikan untuk kebijakan yang akan datang merupakan tujuan evaluasi setelah unsur Tujuan dan Akuntabilitas; maka unsur ke tiga dari suatu Evaluasi adalah Masukan yang adalah opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat di masa yang datang. Adapun masukan yang di berikan atas sebuah evaluasi kebijakan antara lain adalah :

- a. Rumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijakan;
- b. Analisis efek dan dampak tiap Alternatif Kebijakan terhadap kriteria-kriteria tersebut; dan
- c. Tetapkan Alternatif yang terbaik (lebih banyak unsur positif).

2.2 Implementasi Kebijakan

Jhon Edwards III *dalam* Fioma Sihombing (2019), berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) dimensi kritis atau variabel yang mendukung, yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau sikap dan Struktur Birokrasi. Untuk memperjelas masing masing variabel tersebut, maka Edwards III menyatakan sebagai berikut:

a. Dimensi Komunikasi,

- b. Dimensi Sumberdaya
- c. Dimensi Sikap
- d. Struktur Birokrasi

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif, dari struktur kebijakan dan dari proses kebijakan. Abidin *dalam* Foima Sihombing (2019) menyatakan bahwasanya terdapat lima unsur dari suatu kebijakan yaitu :

1. Tujuan Kebijakan.
2. Masalah.
3. Tuntutan (*demand*)
4. Dampak (*outcomes*).
5. Sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*).

2.3 Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Adapun maksud dan tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pemberdayaan masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan di jajaran Pemerintahan Kota Langsa baik di lingkungan Sekretariat Daerah, Kantor Bappeda, Dinas PUPR, UPT Dinas, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan

Rukun Tetangga (RT) serta tempat lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Waktu penelitian di dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010 : 9). Dilanjutkan oleh Lexy J. Moleong *dalam* Budi Darna (2022) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya yang secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan cara pengumpulannya dikenal beberapa cara pengumpulan data penelitian antara lain adalah pengamatan, wawancara, dan penelitian literatur. Demikian juga menurut Bungin (2010 : 110) metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode

penelusuran bahan internet: **Wawancara Mendalam (Indepth Interview), Observasi, Studi Pustaka, Studi Dokumentasi**

3.5 Analisis Data

Nazir (2005 : 346) mengemukakan bahwa analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Effendi dan Maning dalam Masri Singarimbun, (2006).

a. Analisis Diskriptif

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan.

b. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

c. Analisis SWOT.

Analisis SWOT di gunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan secara Internal dan Faktor-faktor Peluang dan Hambatan secara Eksternal. Dari Faktor-faktor tersebut akan dapat di

gambaran Kwadran SWOT seperti berikut :

INTERNAL EKSTERNAL	Strengths	Weaknesses
Opportunities	Strategi SO: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.	Strategi WO: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
Threats	Strategi ST: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).	Strategi TO: mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

Gambar 1. Kwadran SWOT, 2023.

Dalam analisis tersebut, Anda dapat memfokuskan diri pada satu kombinasi dari dua poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategis usaha. Kombinasi fokus tersebut adalah :

- Fokus pada kekuatan-peluang (S-O) untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
- Fokus pada Kelemahan-ancaman (W-T) untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal;
- Fokus pada Kekuatan-ancaman (S-T) dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal dan
- Fokus pada Kelemahan-peluang (W-O) dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil

keuntungan dari kesempatan eksternal

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada tahun 2023, jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan kepadatan 707 jiwa/km. Perlembangan Kota langsa awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001 dengan hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner atau makanan, dan kota wisata.

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 Km², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98° 04' 42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka,

Sebelah Timur dengan Selat Malaka

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan

Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur

Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara acak sepanjang tahun. Meskipun perubahan cuaca sering, curah hujan rata-rata per tahun berkisar dari 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28°-32 °C dan kelembaban relatif rata-rata 75 %.

DPRK Langsa memiliki 25 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DPRK Langsa yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 2 September 2019.^[12] DPRK Langsa dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Langsa periode 2019-2024 dijabat oleh Zulkifli dari Partai Aceh sebagai Ketua, Saifullah dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I, dan Joni dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II.^{[13][14]} Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Langsa dalam dua periode terakhir.



Gambar 2. Masjid Raya Darul Falah Kota Langsa, 2023

Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yakni; Langsa Barat (13 desa/kelurahan), Langsa Kota (10 desa/kelurahan), Langsa Lama (15 desa/kelurahan), Langsa Baro (12 desa/kelurahan), Langsa Timur (16 desa/kelurahan). Mayoritas penduduk

Kota Langsa adalah suku Aceh lalu disusul oleh suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Kota Langsa merupakan kota termaju dan terbesar di provinsi Aceh setelah kota Banda Aceh, kota ini juga merupakan kota terpadat dan teramai setelah Banda Aceh. Bahasa yang digunakan masyarakat kota Langsa adalah: Bahasa Melayu dan bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang dominan dipakai oleh masyarakat kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis, terutama untuk berbicara kepada pendatang luar provinsi Aceh.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Langsa telah berdiri beberapa Perguruan Tinggi antara lain adalah [Universitas Samudra Langsa](#), [IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa](#), Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Kampus LP3I, STIM Pase Langsa, Swmikian juga perguruan tinggi setingkat Akademi yaitu Akademi Kebidanan Harapan Ibu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien, Akademi Keperawatan UMMI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bustanul Ulum Langsa, Akademi Kebidanan Bustanul Ulum dan Akademi Keperawatan DepKes (Departemen Kesehatan).

4.2 Implementasi Kebijakan

Sebagaimana di jelaskan oleh Jhon Edwards III *dalam* Fioma Sihombing (2019), bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) dimensi kritis atau variabel yang mendukung, yang meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau sikap dan Struktur Birokrasi.

Wawancara Bagian Pertama dengan Muhammad Darfian ST selaku Kepala Bappeda Kota Langsa pada

Hari Rabu Tanggal 02 Nopember 2022 mengatakan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Langsa belum berjalan optimal. Dalam hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan konstruksi. Hal ini memang dapat di maklumi mengingat di samping kesadaran akan manfaat program juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang program BSPS, dikarenakan program ini banyak aturan aturan yang harus di ikuti dan ketentuan konstruksi yang juga memiliki persyaratan yang di tetapkan oleh kementerian PUPR.

Muhammad Darfian ST selaku Kepala Bappeda Kota Langsa melanjutkan penjelasannya bahwa pada tahap konstruksi dan pengembangan harus dilakukan kerja sama antara warga masyarakat penerima bantuan namun dalam pengamatan dan informasi dari lapangan khususnya staf pendamping antara penerima bantuan masih cenderung bekerja secara individual.

Demikian juga pelaksana program ini dari instansi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kurang memiliki ketegasan. Sebagai contohnya bila terjadi masalah di lapangan. yaitu calon penerima tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian PUPR. Permasalahan tersebut karena terdapat warga yang tidak memiliki alas hak atas tanah yang mereka miliki karena di peroleh secara turun temurun.

4.2.1 Dimensi Komunikasi

Dimensi Komunikasi menunjukkan peran penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persiapan yang akan

mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

Komunikasi merupakan faktor awal yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Para pelaksana baik dari kementerian PUPR maupun Dinas PUPR Kota Langsa telah mengkomunikasikan program ini kepada Camat dan Lurah atau Wali Kota mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat. Proses selanjutnya tentu di pengaruhi oleh respon atau tanggapan dari masyarakat itu sendiri.

4.2.2 Dimensi Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para aktor memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Selain Sumberdaya Manusia juga terdapat Sumberdaya Pembiayaan berupa pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Langsa. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan juga tidak dapat dilepaskan lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan

menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Hasil wawancara peneliti dengan Muharram, ST, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kota Langsa pada **Wawancara Bagian Kedua** pada Hari Selasa Tanggal 09 Nopember 2022 sekaligus menambahkan bahwa pada tahun 2021 yang lalu pemerintah Kota Langsa telah membangun 103 unit rumah tipe 36 untuk merelokasi warga dari bantaran sungai Langsa dengan sumberdaya pembiayaan sebesar Rp 2,1 Miliar.

4.2.3 Dimensi Sikap

Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam program BSPS dijalankan baik oleh para implementor sehingga mendapat anggapan baik dari masyarakat selama menjalankan program BSPS.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam

pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi.

4.3 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Selanjutnya tentang dimulainya program ini khusus pada tahun 2021 yang lalu diprioritaskan untuk menanggulangi Kawasan kumuh di sepanjang sungai di Kota Langsa. Walikota mengatakan bahwa pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam wilayah kota langsa yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Langsa.



Gambar 3. Wali Kota Langsa pada acara BSPS, 2021.

Wali Kota Langsa mengatakan bahwa diprioritaskan sebanyak 103 unit rumah tipe 36 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka relokasi warga dari bantaran Sungai Langsa di Provinsi Aceh. Rumah yang dibangun dengan tipe 36 yang akan dibangun

bagi warga masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran sungai. Pada tahap pertama pembangunan rumah tersebut direalisasikan di dua gampong, yakni Gampong Teungoh tepatnya di Dusun Rumoh Potong serta Dusun Timbangan, dan Gampong Jawa di Kecamatan Langsa Kota.

Adapun luas lahan yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan rumah BSPS itu sekitar 13 hektar dimana lahan ini akan dihibahkan kepada masyarakat penerima manfaat dari program ini. Walikota berpesan kepada Geuchik (kepala desa), semoga dapat menerima warga baru di sini ditempat lokasi program BSPS tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Langsa, Muharram, yang mendampingi Geuchik mengatakan bahwa sumber dana pembangunan rumah ini merupakan *shering* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa sebesar Rp800 juta untuk tapak rumah, Rp200 juta jaringan air bersih, dan 100 juta jaringan listrik.

KESIMPULAN

- Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal karena masih kurangnya Sosialisasi sehingga berdampak kurangnya pemahaman akan procedure /persyaratan baik administrasi maupun teknis.
- Faktor Pendornng dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari Kekuatan (Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dan Peluang (Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga

- Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan).
- c. Sedangkan Faktor Penghambat adalah Adanya Kelemahan (Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS; Penyaluran bahan dan material, Minimnya pengetahuan penerima tentang pertanggungjawaban) serta Ancaman atau Hambatan (Cuaca hujan tinggi saat konstruksi, Perubahan kebijakan tentang BSPS, Kestinambungan program BSPS).
- d. Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif yaitu Strategi Menggunakan KEKUATAN dengan memanfaatkan PELUANG. Menggunakan Kekuatan yaitu : Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dengan Memanfaatkan Peluang yaitu : Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan sosialis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga lebih mudah di pahami calon penerima. Demikian juga perlu penyesuaian kondisi masyarakat local dengan persyaratan teknis agar persyaratan status tanah calon penerima BSPS jika belum memiliki surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku cukup dengan Surat Keterangan untuk selanjutnya pemerintah memfasilitasi untuk menda[atkan surat tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendorong dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) perlu terus di tingkatkan khususnya ketersediaan dana untuk dapat

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sedangkan Faktor Penghambat yang perlu di minimalkan adalah perubahan kebijakan yang terjadi di kementerian PUPR yang sehingga program dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif di sarankan agar ada dana pendamping oprasional uuntuk petugas teknis lapangan yang bersumber dari APBD Kota Langsa.

1) Meninjau kembali syarat dan ketentuan calon penerima bantuan khususnya terkait status kepemilikan tanah. 2) Persyaratan untuk penerima bantuan yang sekiranya memberatkan atau menyulitkan seharusnya dihilangkan.3)Bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya meliputi bahan bangunan saja melainkan juga meliputi biaya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. 4) Desain rumah seluruh penerima bantuan disamakan agar tidak terjadi kekurangan dan dapat mencukupi kriteria rumah sehat.5) Diperlukan adanya pengawasan dari pelaksana mulai dari proses sosialisasi program hingga proses pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku–Buku Cetak dan Elektronik :

- Arikunto, S. 2010.* Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan M. 2009.* Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke15. Jakarta: Bumi Aksara.Nugroho,
- _____. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita
- N, William. 2003.* Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua

- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 610
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005**, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Miles dan Hubberman. (1997)**. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta, Kanisius.
- Moleong, Lexy J. (2002)**. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015**. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadri. (2000)**. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif Yogyakarta, Ghalia Gajah Mada University Press.
- Samudra, Wibawa. 2004**. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta
- Sugiono, 2010**. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Teguh Yuwono dkk. 2002**. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarno dalam Budi. (2007)**. Kebijakan Publik Teori dan Konsep. Yogyakarta : Medpres
- Widyoko, Eko Putro. 2009**. Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik) Yogyakarta: Pustaka Pelajar